

**IMPLIKASI PERJANJIAN PARIS TERHADAP PENGAMBILAN  
KEBIJAKAN PENURUNAN GAS EMISI DI CHINA**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional

Oleh :

**Tity Ayu Yuliasih**

**4514023012**

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Bosowa Makassar

2018

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLIKASI PERJANJIAN PARIS TERHADAP PENGAMBILAN  
KEBIJAKAN PENURUNAN GAS EMISI DI CHINA**

**TITY AYU YULIASIH**

**45 14 023 012**

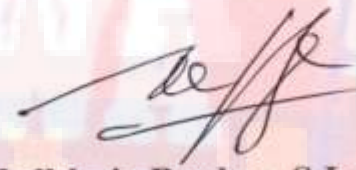
Skripsi Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Beche Bt Mamma, S.Ip, M.A**



**Zulkhair Burhan, S.Ip, M.A**

**Diketahui Oleh**

Dekan FISIP. Universitas Bosowa

Ketua Jurusan Hubungan  
Internasional



**Arief Wicaksono, S.Ip, M.A**



**Zulkhair Burhan, S.Ip, M.A**


## HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari *Kamis Enam Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas* Skripsi Dengan Judul **“Implikasi Perjanjian Paris Terhadap Pengambilan Kebijakan Penurunan Gas Emisi Di China”**

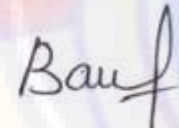
Nama : **Tity Ayu Yuliasih**  
Nomor Induk : **45 14 023 012**  
Jurusan : **Ilmu Politik**  
Program Studi : **Ilmu Hubungan Internasional**


Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Sarjana Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar

**Pengawas umum :**

  
**Arief Wicaksono, S.Ip, M.A**  
Dekan FISIP, Universitas Bosowa

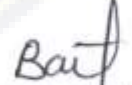
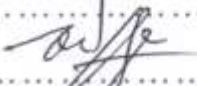


**Panitia Ujian :**

  
**Beche Bt Mamma, S.Ip, M.A**  
Ketua

  
**Zulkhair Burhan, S.Ip, M.A**  
Sekretaris

**TIM Penguji :**

1. Beche Bt Mamma, S.Ip, M.A
2. Zulkhair Burhan, S.Ip, M.A
3. Arief Wicaksono, S.Ip, M.A
4. Finahliyah Hasan, S.Ip, M.A

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

## ABSTRAK

Tity Ayu Yuliasih, 2018, 4514023012, Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa Makassar, Implikasi Perjanjian Paris Terhadap Penurunan Gas Emisi Di China, Pembimbing I : Beche BT. Mamma, S.Ip.,MA. Pembimbing II : Zulkhair Burhan, S.Ip.,MA.

Penelitian ini membahas mengenai isu perubahan iklim di China. Perubahan iklim memiliki dampak negatif bagi negara-negara di dunia baik negara maju maupun berkembang. Upaya untuk menangani perubahan iklim tersebut negara-negara melakukan kerjasama melalui forum-forum internasional. Pada tahun 2015 *United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* mengadakan *Confrence of Parties (COP)* ke 21 yang menghasilkan *Paris Agreement*. China sebagai salah satu negara penghasil emisi gas terbesar didunia yang meratifikasi Perjanjian Paris. Dalam hal ini China membuat kebijakan terhadap penurunan gas emisi dinegaranya.

China dalam meratifikasi Perjanjian Paris membuat kebijakan yang dipengaruhi oleh tekanan masyarakat, organisasi domestik China yang menginginkan udara, air bersih dan kesehatan masyarakat. Walaupun ada beberapa kebijakan yang dipengaruhi oleh Perjanjian Paris seperti penggunaan teknologi panel surya serta mengurangi pemakaian batu bara, tetapi pada kenyataannya masyarakat domestik yang lebih mempengaruhi pembuatan kebijakan penurunan gas emisi di China

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robill'Aalamiin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT serta junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implikasi Perjanjian Paris Terhadap Penurunan Gas Emisi Di China.


Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuk mulai dari bimbingan, motivasi, secara moril maupun materil. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Keluarga saya, terutama kedua orang tua (**Mulyadi dan Alm. Nur Hanifah**) yang tak henti-hentinya memberikan dukungan mulai dari kecil hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai bentuk dukungan, mulai dari doa yang sangat mulia, motivasi, dukungan materi maupun moril, rasanya tak akan cukup menuliskan rasa terima kasih dibandingkan dengan apa yang orang tua saya berikan kepada saya, sekali lagi terima kasih banyak. Tak lupa juga sampaikan rasa terima kasih kepada saudara saya, Rizki Syawaldi semoga kita bisa membanggakan kedua orang tua kita. Serta Alm bude. Elina Elyas terima kasih telah menjaga, merawat dari kecil. Serta keluarga besar dari kedua orang tua, saya menyampaikan banyak terima kasih.
2. Dekan FISIPOL Universitas Bosowa Makassar Arief Wicaksono,S.Ip.MA, Kepala Jurusan Hubungan Internasional, Zulkhair Burhan,S.Ip, MA selaku pembimbing, serta Beche BT Mamma, S.Ip, MA selaku penasehat akademik terima kasih atas waktu, arahan dan nasehat yang telah bapak ibu berikan selama ini.
3. Kepada Fivi Elvira Basri S.Ip, MA, Finahliyah Hasan S.Ip, MA, Rosnani S.Ip, MA, Asy'ari Mukrim S.Ip, MA Dosen Hubungan Internasional yang telah mengajarkan dan berbagai ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan,Yaya, Oli, Melfi, Ling, Sheryl, Ovan, Sukma, Endah, Tini, Pangeran, Angga, Ade.
5. Keluarga saya dari ibu bapak yang lain, Ibu Sulfi, Om Agus, Kak Lia, Kak Lola, Kak Nita, Adek Rifat, Fitri, Burhan, Uli, Rahmat, Fikar,Azizah,Dadang,Yusril dan anak-anak yang lainnya terima kasih dukungannya.
6. Sahabat kecil saya Winda yang selalu menjadi sahabat yang pengertian. Serta kepada kak geishika, kak ega, kak tami serta seluruh kakak senior himpunan maupun BEM. Dan seluruh anak Fisipol Universitas Bosowa Makassar
7. Dan semua pihak yang telah membantu baik dalam memberikan dukungan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.



Penulis berharap semoga segala dukungan dan bantuan ini mendapat imbalan dari Allah SWT dan menjadi amal kebaikan. Meskipun Skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, semoga apa yang telah tertulis dapat membantu penulis yang lainnya.

Makassar, 29 September 2018

  
Tity Ayu Yuliasih

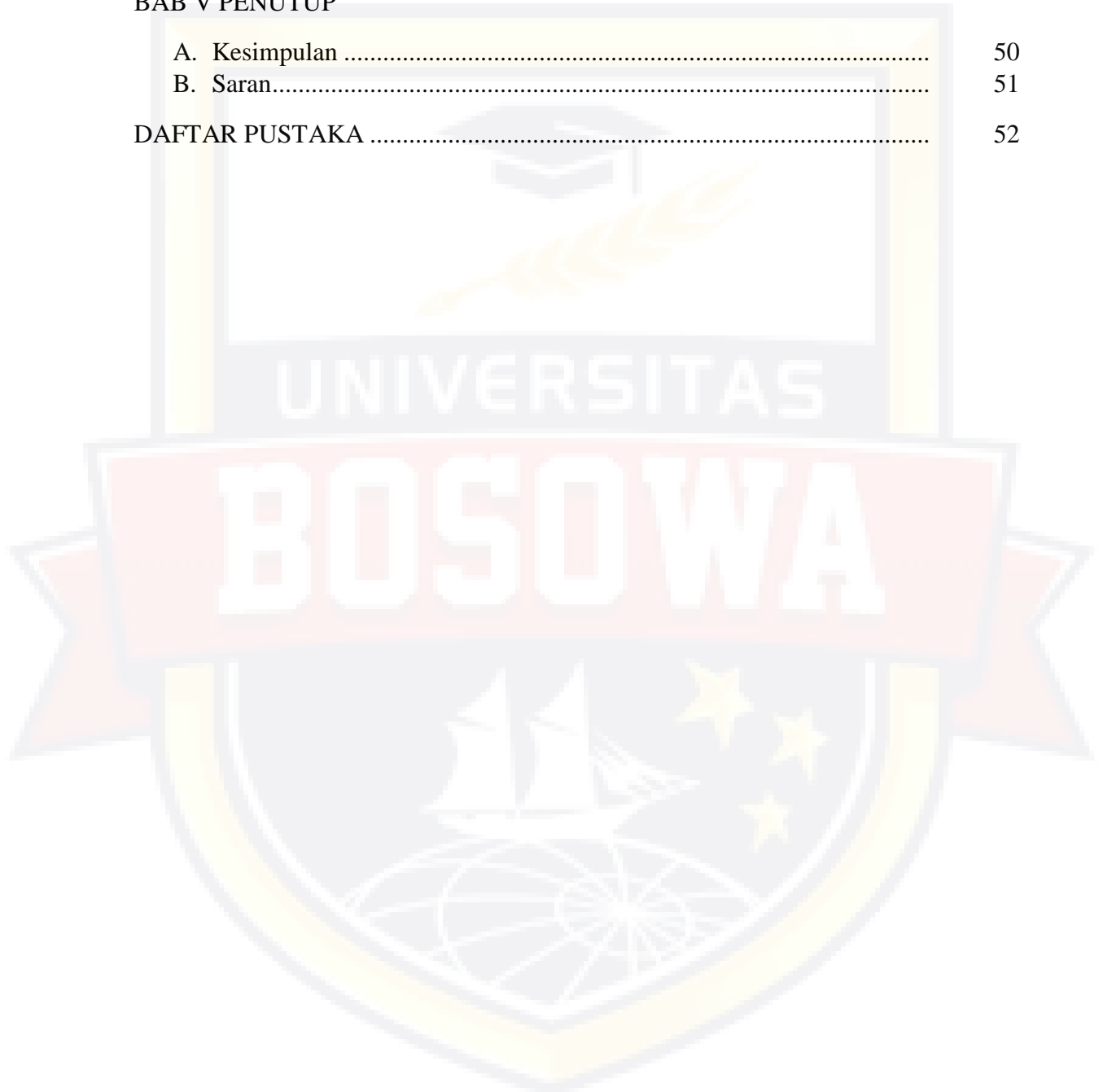
UNIVERSITAS

**BOSOWA**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN .....	i
LEMBAR PENERIMAAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Dan Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Rancangan Sistematika .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Rezim Lingkungan .....	12
B. Kebijakan Politik .....	15
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
A. Perjanjian Paris .....	20
B. China Dari Protokol Kyoto Hingga Perjanjian Paris .....	23
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pengaruh Paris Agreement Terhadap Penurunan Gas Emisi .....	28
B. Kebijakan Penurunan Gas Emisi China .....	33
1. Kebijakan China di Protokol Kyoto .....	33
2. National Development and Reform Commission (NDRC) .....	38
3. Intended Nationally Determined Contribution (INDC) .....	40
4. 13th Five Year Plan .....	43

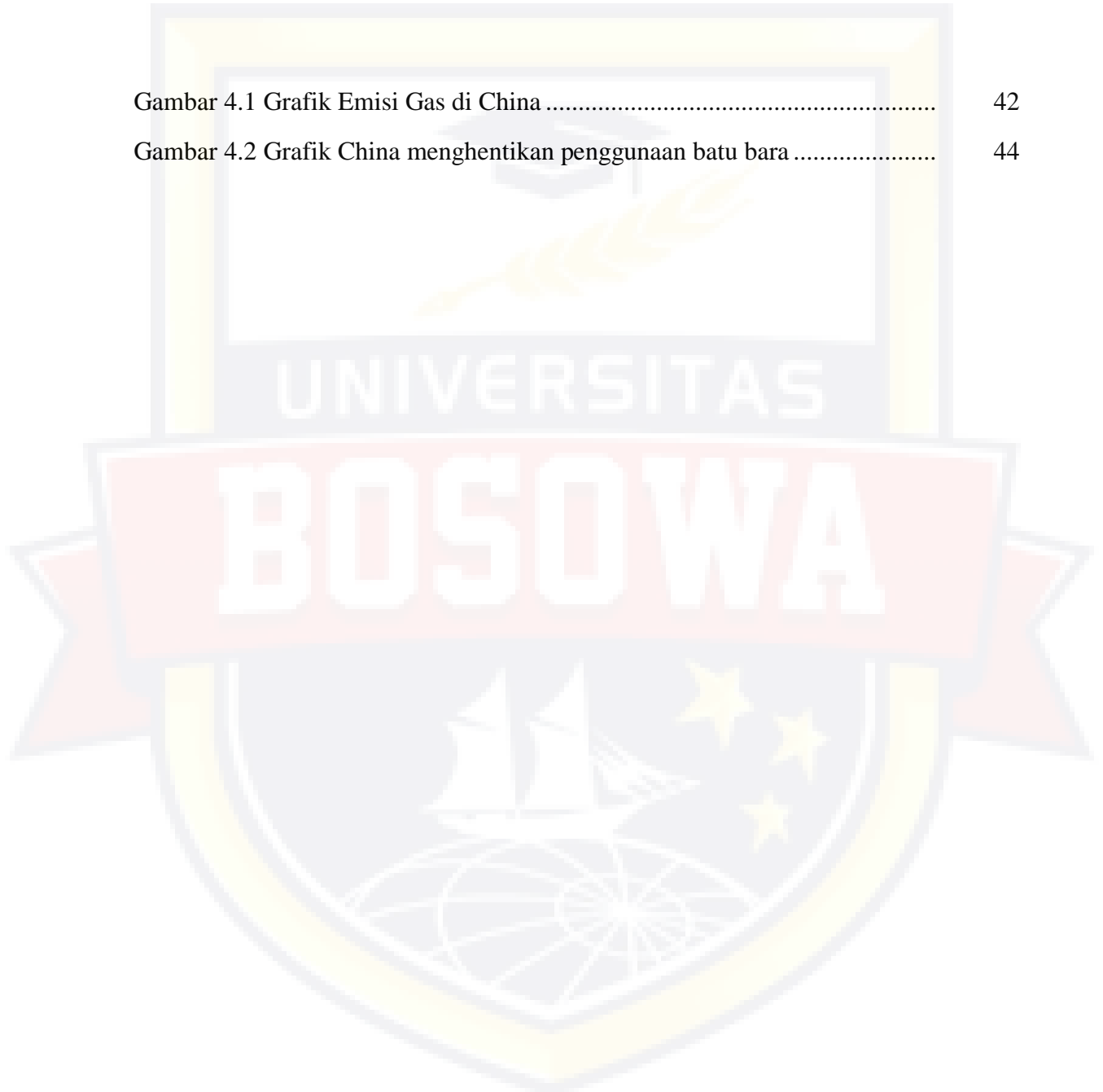
5. Perdagangan Karbon .....	45
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Grafik Emisi Gas di China .....	42
Gambar 4.2 Grafik China menghentikan penggunaan batu bara .....	44



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ancaman perubahan iklim menjadi sebuah isu keamanan lingkungan (*environmental security*) yang digolongkan sebagai isu keamanan non-tradisional (*non traditional security*) dalam hubungan internasional. Isu perubahan iklim tidak hanya menyangkut masalah lingkungan hidup semata, tetapi isu ini juga terkait dengan bidang lainnya seperti politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan.

Sebagai contoh, isu kenaikan gas emisi yang berdampak pada kesehatan serta keamanan lingkungan nasional suatu negara maupun secara global. Dampak yang dapat dirasakan secara langsung pengaruh gas emisi yaitu meningkatnya suhu permukaan bumi dan dapat mengakibatkan meningginya permukaan air laut. Oleh sebab itu pada tahun 2002, suhu yang cukup hangat menyebabkan pencairan permukaan es terbesar di Greenland. Di puncak gunung Kilimanjaro, gletser diperkirakan akan hilang sepenuhnya pada tahun 2020. Di pegunungan Himalaya, Alpen dan Alaska, ribuan tempat gletser akan berkurang dengan cepat.<sup>1</sup>

Pentingnya isu lingkungan tidak hanya mendapat perhatian dari pemerintah nasional saja sebagai salah satu isu yang penting isu lingkungan mulai mendapatkan perhatian khusus diseluruh dunia. Sejak saat itu banyak diadakan pertemuan tingkat

---

<sup>1</sup> WWF, upaya wwf terhadap tantangan tentang iklim dan energi, [https://www.wwf.or.id/tentang\\_wwf/upaya\\_kami/iklim\\_dan\\_energi/tentang\\_iklim\\_dan\\_energi/tantangan/diakses\\_pada\\_16\\_juli\\_2018](https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/iklim_dan_energi/tentang_iklim_dan_energi/tantangan/diakses_pada_16_juli_2018)

internasional guna membahas dan bekerja sama dalam menangani isu lingkungan. Salah satu upaya pertemuan tingkat internasional yang penting adalah konferensi *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Kyoto pada tahun 1997 di Kyoto, Jepang. Pertemuan ini kemudian menghasilkan suatu protokol yang dikenal dengan nama Protokol Kyoto. Protokol tersebut bertujuan untuk mengurangi emisi gas yang dihasilkan negara – negara industrial secara kolektif.

Dalam perkembangannya, Protokol Kyoto mendapatkan kritikan dari beberapa negara karena dianggap tidak lagi menguntungkan untuk negara tersebut. Seperti negara Kanada yang akhirnya memutuskan untuk keluar dari protokol Kyoto pada tahun 2011 dikarenakan pada tahun 2005 Kanada berkewajiban untuk menurunkan gas emisi sebanyak 2,0% dan kemudian bertambah menjadi 17% pada 2011 akibat industri alberta.<sup>2</sup>

Setelah Kanada memutuskan untuk keluar dari protokol Kyoto, (Conference of the Parties) COP-17 diadakan di Durban, Afrika Selatan dengan hasil keputusan dibentuknya *The Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action* (ADP) yang bertujuan untuk setiap negara mengembangkan protokol hingga pada pertemuan COP selanjutnya.

---

<sup>2</sup>Latuconsina, RB. (2017).*Perubahan Kebijakan Lingkungan Kanada di Bawah Pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau Dalam Meratifikasi Perjanjian Paris Tahun 2016*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diakses 15 juni 2018

Sebanyak 196 negara bertemu di Paris untuk membahas dan berunding mengenai perubahan iklim dalam *Conference of Parties (COP) ke-21 UNFCCC*. Pembentukan perjanjian Paris bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan konvensi perubahan iklim setelah berakhirnya protokol Kyoto. Dalam pembentukan perjanjian Paris ini diharapkan dapat memunculkan harapan yang besar seperti keinginan untuk membuat rencana yang tegas pada periode 2030. Dalam rencana ini menyatakan adanya persetujuan untuk membentuk sebuah komitmen bagi kesepakatan iklim global yang baru, setelah terdapat kepastian dalam kegagalan pemenuhan protokol Kyoto. Perjanjian Paris juga menindaklanjuti protokol Kyoto dengan pendekatan yang berbeda yakni diterapkannya prinsip *applicable for all* yang lebih bertujuan partisipasi yang luas serta menjamin negara – negara maju untuk tetap berkomitmen pada penurunan emisi hingga tahun 2030 agar tidak lebih dari 2 derajat celcius dan mempertahankan rata – rata 1,5 derajat celcius suhu bumi.<sup>3</sup>

Perjanjian Paris terdiri dari 29 pasal yang dibentuk dan untuk mengejar pencapaian tujuan dari UNFCCC 1992 yang didasarkan pada prinsip – prinsip yang telah disepakati. Dalam perjanjian Paris juga tetap ditegaskan mengenai pentingnya peran pemerintah nasional dan berbagai aktor ataupun perangkat peraturan perundang – undangan nasional. serta meningkatkan kesadaran secara global diperlukan pendidikan dan pelatihan dalam upaya untuk menurunkan gas emisi. Dapat dilihat dari kutipan berikut *“Recognizing the importance of the engagements of all levels of*

---

<sup>3</sup> IESR.or.id, *“IESR: saatnya negara maju berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca”*  
<http://iesr.or.id/2011/03/produksi-karbon-manusia/> diakses 24 juni 2018

*government and various actors, in accordance with respective national legislations of Parties, in addressing climate change”<sup>4</sup>*. Dan perjanjian ini menjadi perjanjian yang terbuka untuk ditandatangani dan diratifikasi oleh semua negara dan organisasi – organisasi yang terkait di UNFCCC.

Pada akhirnya terbentuknya beberapa pasal pada perjanjian Paris, tetap masih akan mendapat perkembangan melalui COP atau pertemuan lainnya dalam mempersiapkan aturan, dan keputusan – keputusan keorganisasian. Hasil dari COP-21 UNFCCC yaitu perjanjian Paris yang akhirnya perjanjian ini memberikan peluang bagi negara – negara berkembang untuk berpartisipasi dalam upaya penurunan temperature global dibawah 2 derajat celcius.<sup>5</sup> Perjanjian Paris mencerminkan kesetaraan dan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan sesuai kapabilitas Negara Pihak, dengan mempertimbangkan kondisi nasional yang berbeda-beda. Selain itu, Perjanjian Paris diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi, tanpa mengancam produksi pangan, dan menyiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim

Terkait hal tersebut, salah satu negara yang mendapatkan perhatian global adalah China. Sebagai salah satu negara anggota non annex, China merupakan negara

---

<sup>4</sup>Paris Agreement.

([https://www.google.com/url?q=https://unfccc.int/sites/default/files/english\\_Paris\\_agreement.pdf&sa+U&ved=2ahUkEwiU6](https://www.google.com/url?q=https://unfccc.int/sites/default/files/english_Paris_agreement.pdf&sa+U&ved=2ahUkEwiU6)) diakses pada 11 juli 2018

<sup>5</sup> Tempo.co. “ktt perubahan iklim di Paris berakhir berikut hasil pembahasan”

(<https://nasional.tempo.co/read/727284/ktt-perubahan-iklim-di-Paris-berakhir-berikut-hasil-pembahasan>) diakses pada 16 juli 2018

yang menyumbangkan gas emisi terbesar yang harus selalu ditekan oleh negara lain untuk menurunkan gas emisinya hingga batas yang ditetapkan. Pada dasarnya faktor industrialisasilah yang membuat China sebagai penghasil gas emisi terbesar didunia. Pada protokol Kyoto kewajiban untuk menurunkan gas emisi terbagi menjadi dua annex. annex I untuk negara-negara yang wajib menurunkan emisinya pada angka tertentu yang umumnya diemban oleh negara-negara maju dan negara-negara dalam masa transisi. Sedangkan negara-negara non-annex yang umumnya negara-negara berkembang, tidak dibebani kewajiban untuk menurunkan emisi namun harus melaporkan status emisinya dan dapat berpartisipasi dalam menurunkan emisi melalui kerjasama dengan negara yang termasuk annex I. China pada awalnya berada pada non annex tetapi industrialisasi yang terjadi di negara China menjadikan negara ini sebagai salah satu negara non annex penghasil emisi gas terbesar di dunia.

Pada tahun 2009 China merupakan negara penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) ke udara terbesar di dunia yang diakibatkan oleh aktivitas industri mereka. data pada tahun 2014 memperlihatkan *the six largest emitting countries* yaitu Tiongkok (China) 30%, Amerika Serikat 15 %, Uni Eropa 9,6 %, India 6,6 %, Rusia 5,0 % dan Jepang 3,6 %, China tetap menjadi negara pertama penghasil gas emisi di dunia.<sup>6</sup>

China telah meratifikasi perjanjian Paris pada di tahun 2016, China

---

<sup>6</sup>Komeini Ayatullah (2017). *Diplomasi Tiongkok Terhadap Amerika Serika dalam Paris Agreement tahun 2015-2016*. Universitas Riau. <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/issue/view/433> diakses 17 juni 2018

meratifikasi perjanjian Paris ini untuk tetap menanggulangi pencemaran lingkungan di negaranya. Emisi gas yang dihasilkan Negara China terus meningkat tiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan kegiatan industri yang dilakukan negara tersebut. Pada perjanjian Paris, China bertujuan untuk menurunkan gas emisi pada batas dibawah 2 derajat pada tahun 2030. Data di tahun 2016 gas emisi China sebanyak 11522 emisi gas rumah kaca (MtCO<sub>2</sub>e), sebelumnya pada tahun 2015 gas emisi China berada pada kisaran 11543 emisi gas rumah kaca (MtCO<sub>2</sub>e).<sup>7</sup> Walaupun penurunan gas emisi di China masih dikatakan jauh dari ketentuan tetapi China menunjukkan sisi positif dalam menurunkan gas emisi di negaranya.

Penelitian ini hendak mencairitahu lebih jauh terkait korelasi atau hubungan antara China yang telah meratifikasi perjanjian Paris dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh China dalam usahanya menurunkan gas emisi.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **a. Batasan Masalah**

Perjanjian Paris merupakan kelanjutan dari protokol Kyoto. Perjanjian Paris ini dimulai dari tahun 2015 yang diikuti oleh beberapa negara. Penulis membatasi tulisan ini dari tahun 2015-2017

---

<sup>7</sup> Climate Action Tracker, <https://climateactiontracker.org/countries/China/> diakses pada 16 juli 2018



## **b. Rumusan Masalah**

Bagaimana pengaruh Perjanjian Paris dalam pengambilan kebijakan China terhadap penurunan gas emisi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah seperti penulisan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui seberapa berpengaruh perjanjian Paris dalam pengambilan kebijakan luar negeri di China

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Diharapkan tulisan ini menjadi suatu upaya untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pengaruh perjanjian Paris dalam pengambilan kebijakan luar negeri di China.
- b. Diharapkan tulisan ini dapat dijadikan satu bahan rujukan oleh mahasiswa, akademisi, ataupun peneliti lain yang lebih khususnya terkait dengan pengaruh perjanjian Paris dalam pengambilan kebijakan luar negeri di China.
- c. Diharapkan tulisan ini para Penstudi Ilmu Hubungan Internasional serta peminat isu – isu global khususnya dalam pengambilan kebijakan luar negeri di China

## **D. Kerangka Konseptual**

### **1. Rezim Lingkungan**

Terciptanya rezim lingkungan ini adalah isu lingkungan global ditandai dengan tingginya tingkat ketidakpastian dimana “definisi dan batasan” masalah, biaya respon kebijakan alternatif, dan identitas aktor dengan kepentingan-kepentingannya. Seriusnya permasalahan lingkungan (khususnya perubahan iklim, penipisan ozon, berkurangnya keanekaragaman biologi, perlindungan hutan) mengundang negara untuk bekerja sama dan mengadakan pengelolaan bersama meskipun tingkat ketidakpastian ilmiah dan ekonomi sangat tinggi. Menurut James Sebenius (1991) rezim lingkungan muncul karena perubahan alam yang signifikan dan menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya. Negara merasa membutuhkan suatu rezim lingkungan untuk mengatasi isu tersebut.

### **2. Kebijakan Politik**

Kebijakan politik menurut David Easton, *Political System* sebuah kebijakan politik yang berupa keputusan presiden dan berbagai aturan yang ditetapkan pemerintah.<sup>8</sup> Dalam proses perumusan kebijakan faktor-faktor yang mempengaruhi membuat kebijakan antara lain : adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatif), adanya

---

<sup>8</sup> Yansan Mochamad, (2008) “*Perspektif-perspektif Politik Luar Negeri*,” [http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/perspektif\\_perspektif\\_politik\\_luar\\_negeri.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/perspektif_perspektif_politik_luar_negeri.pdf) diakses 11 juni 2018

pengaruh sifat-sifat pribadi, adanya pengaruh dari kelompok luar. Faktor utama pengambilan kebijakan suatu negara adalah kebijakan domestik.

## **E. Metode Penelitian**

### **a. Tipe penelitian**

1. Deskriptif, penelitian yang mencoba menggambarkan fenomena yang diteliti sesuai dengan perspektif yang digunakan penulis untuk membenah fenomena. Selain itu, deskriptif juga digunakan untuk menggambarkan hasil dan pembahasan yang menjawab pertanyaan bagaimana yang ada di dalam rumusan masalah
2. Eksplanatif, penelitian yang menjelaskan dan mencari penyebab terjadinya suatu fenomena .

### **b. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Data Premier**

Sumber data lain dari website resmi yaitu hasil generalisasi fakta – fakta yang tersebar atau hasil identifikasi terhadap pernyataan pihak otoritas yang dimuat melalui media massa.

#### **2. Data sekunder**

Data hasil olahan yang dihasilkan oleh penelitian sebelumnya atau yang disiapkan oleh lembaga – lembaga atau badan pemerintah maupun swasta. Sumber data ini antara lain : kunjungan ke suatu lembaga atau badan pemerintah maupun swasta, hasil penelusuran kepustakaan, atau dokumen – dokumen resmi lainnya.

### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Telaah pustaka

Pengumpulan data dengan cara menelusuri berbagai literatur buku teks, buku pelengkap, majalah dan terbitan berkala, jurnal ilmiah, bulletin untuk memperoleh bahan atau data sehubungan dengan topic penelitian.

### **d. Teknik Analisis Data**

1. analisa kualitatif, analisa data yang diterapkan pada data – data non matematis. Analisa dilakukan terhadap pernyataan pemegang otoritas, kutipan dari sumber – sumber kepustakaan.
2. Analisa kuantitatif, analisa terhadap data – data statistik. Biasanya analisa ini dilakukan sebagai penunjang atau memperkuat analisa kualitatif.

### **F. Rancangan Sistematika Pembahasan**

#### **1. Bab 1**

merupakan bagian pendahulu yang terdiri atas latar belakang, permasalahan, tujuan dan signifikansi, tinjauan pustaka, kerangka teori, operasionalisasi konsep, hipotesa, metode penelitian dan sistematika penelitian.

#### **2. Bab 2 : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini memuat pembahasan tentang penelusuran keputusan dan literature tentang

### 3. Bab 3 : Gambaran Umum

Penulis akan menjelaskan gambaran umum perjanjian Paris, industrialisasi China serta proses masuknya China dari protokol Kyoto hingga perjanjian Paris

### 4. Bab 4 : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menganalisa apakah perjanjian Paris ini memiliki dampak besar terhadap pengambilan kebijakan penurunan gas emisi di China serta dampak yang di dapatkan dari perjanjian Paris tersebut.

### 5. Bab 5 : Kesimpulan dan Saran

Penulis akan menyimpulkan pembahasan hasil penelitian serta memberikan kritik dan saran untuk penulisan selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Rezim Lingkungan

Salah satu alasan utama terciptanya rezim lingkungan ini adalah isu lingkungan global ditandai dengan tingginya tingkat ketidakpastian dimana “definisi dan batasan” masalah, biaya respon kebijakan alternatif, dan identitas aktor dengan kepentingan-kepentingannya.

Stephen Krashner merumuskan definisi rezim lingkungan dengan, prinsip-prinsip, norma-norma, aturan, dan prosedur pembuatan kebijakan yang dapat mempengaruhi suatu negara. Sebagai contoh rezim perdagangan internasional yang lama dipandu oleh prinsip memaksimalkan kekayaan global, didukung oleh norma perdagangan bebas, prinsip timbal balik, dan ditopang oleh diplomasi multilateral, dalam bentuk pembicaraan perdagangan antar negara yang diselenggarakan oleh organisasi internasional.<sup>9</sup> Sistem perjanjian lingkungan yang menjadi lembaga yang ambigu sistem yang diterapkan sangat dinamis dan pengambilan keputusan untuk mempercepat kelola lingkungan internasional. Namun sistem yang digunakan tidak mengikat secara hukum.

Menurut James Sebenius (1991) rezim lingkungan muncul dikarena perubahan alam yang signifikan dan menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya. Negara merasa membutuhkan suatu rezim lingkungan untuk

---

<sup>9</sup> Verbeek.J.A (2011), “*Regime Theory In International Relation*”,  
[https://www.researchgate.net/publication/254898594\\_Regime\\_Theory\\_in\\_International\\_Relations](https://www.researchgate.net/publication/254898594_Regime_Theory_in_International_Relations)  
diakses 01 Oktober 2018

mengatasi isu tersebut. Dalam perkembangannya terdapat beberapa rezim lingkungan yaitu UNCLOS, Protokol Montreal, Protokol Helsinki, Protokol Sofia dan yang paling sering dibahas adalah Protokol Kyoto. Perbedaan rezim lingkungan dan rezim internasional lainnya adalah proses terbentuknya rezim lingkungan didorong oleh kesadaran negara yang terlibat. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh rezim lingkungan, yaitu aspek teknis dan ideologis-politis. Aspek teknis menyangkut sulitnya pencapaian solusi dikarenakan hasil yang tidak konkrit. Contohnya adalah pengurangan emisi yang dicanangkan oleh Protokol Kyoto, pengurangan kerusakan akibat pengurangan emisi tidak dapat dilihat langsung hasilnya. Sedangkan aspek ideologis-politis, banyak negara yang menolak rezim dikarenakan kepentingan yang berbenturan.<sup>10</sup>

Permasalahan lingkungan ini selain perlu adanya dukungan dari negara-negara tentu perlu juga dikembangkannya rezim yang membantunya. Dalam pengembangan rezim ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah membentuk tahapan agenda. Pada tahapan ini, permasalahan lingkungan telah dideteksi dan sudah menjadi agenda bagi politik internasional yang mana perlu adanya negosiasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, tahapan negosiasi dan pengambilan keputusan. Pada tahapan ini proses politik dibawa pada isu yang menjadi daftar teratas dari agenda. Kemudian keputusan

---

<sup>10</sup> Warista Yolanda, "*Peran Global Governance Dan Rezim Lingkungan Dalam Mengatasi Masalah Isu-Isu Lingkungan Hidup*"  
[https://www.academia.edu/32094746/peran\\_global\\_governance\\_dan\\_rezim\\_lingkungan\\_dalam\\_mena\\_nggulangi\\_isu-isu\\_lingkungan\\_hidup](https://www.academia.edu/32094746/peran_global_governance_dan_rezim_lingkungan_dalam_mena_nggulangi_isu-isu_lingkungan_hidup) diakses 30 september 2018



internasional akan membuat kebijakan dan peraturan untuk menyelesaikan atau menangani isu tersebut. Yang ketiga adalah tahapan implementasi. Pada tahapan ini, semua aktifitas terlibat dalam implementasi keputusan dan kebijakan sebagai respon dari permasalahan atau isu. Rezim ini akan bertahan bila aktor di dalamnya dapat berkomitmen dan berpartisipasi. Yang keempat, rezim perlu adanya perkembangan lebih lanjut untuk meningkatkan keefektifannya. Bisa dengan terlembaganya rezim, memahami permasalahan dengan baik, atau dengan kesempatan baru dalam politik atau ekonomi.

Perjanjian Paris merupakan salah satu rezim internasional di bidang lingkungan yang merupakan hasil kesepakatan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa dan para ahli di dunia melalui sebuah proses interaksi dan negosiasi. Setelah Perjanjian Paris terbentuk, negara-negara yang menyepakatinya beserta aktor-aktor internasional terkait secara otomatis telah menerima kewajiban-kewajiban tertentu yang menjadi konsekuensi bagi negara-negara atau aktor yang menjadi bagian dari rezim internasional tersebut. Perjanjian Paris berkomitmen untuk menurunkan emisi di tahun 2030 tidak lebih dari 2 derajat celsius dan mempertahankan rata-rata 1,5 derajat celsius suhu bumi.

Sebagai sebuah rezim internasional yang dibentuk oleh PBB dalam implementasi perjanjian Paris juga mendapatkan dukungan global terutama dalam aspek mobilisasi sumber finansial demi tercapainya tujuan perjanjian Paris. PBB memfasilitasi terbentuknya prinsip-prinsip, norma-norma, dan aturan yang jika

disepakati oleh suatu negara maka akan diimplementasikan melalui kebijakan nasional negara masing-masing demi tercapainya tujuan bersama.

## **B. Kebijakan Politik**

Kebijakan politik menurut David Easton, *Political System* sebuah kebijakan politik yang berupa keputusan presiden dan berbagai aturan yang ditetapkan pemerintah. Dalam proses perumusan kebijakan faktor-faktor yang mempengaruhi membuat kebijakan antara lain : adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatif), adanya pengaruh sifat-sifat pribadi, adanya pengaruh dari kelompok luar. Salah satu asumsi dasar *Level of Analysis* variabel domestik bahwa penjelasan politik dalam negeri mencerminkan setidaknya terdapat satu negara yang bersifat non-uniter (*nonunitary*), artinya negara tidak bisa bertindak sendiri. Kebijakan-kebijakan luar negeri yang diambil bukan merupakan hasil dari tindakan uniter suatu negara, terdapat faktor-faktor lain dalam penentuan kebijakan tersebut yang menunjukkan bahwa negara bersifat non-uniter. Asumsi selanjutnya adalah negara negara yang bersifat non-uniter tersebut berusaha untuk mencapai sebuah kebijakan luar negeri yang tidak, atau kurang optimal, hal itu terjadi karena adanya interaksi-interaksi antara para pembuat keputusan dengan aktor-aktor lain dalam suatu negara. Breuning (2007: 117), yaitu bahwa para pembuat keputusan merupakan hasil sekaligus perwakilan dari masyarakat mereka. Mereka dibentuk oleh masyarakat melalui pendidikan dan mereka dapat memiliki kesadaran yang lebih sedikit

ataupun lebih besar terkait dengan sejarah dan permasalahan internasional. Para pembuat keputusan memiliki sebuah pengertian lebih terkait dengan sistem politik negara mereka masing-masing. Mereka juga berusaha untuk mencapai sebuah pengertian sepenuhnya mengenai pilihan domestik untuk mendapatkan informasi terkait dengan reaksi masyarakat domestik pada pengajuan dan keputusan tertentu.<sup>11</sup>

Solichin Abdul Wahab (2012) menyatakan bahwa pada hakikatnya kebijakan terdiri atas tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan atau petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih detail, bersangkut paut dengan proses implementasi dan mekanisme pemberlakuannya.<sup>12</sup>

Menurut Friedrik (1963): kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan. Jadi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan sebuah dalam sebuah

---

<sup>11</sup> Salma, "Variable Domestik Dan Kebijakan Luar Negeri", [http://salmafisio13.web.unair.ac.id/artikel\\_detail/varibel-domestik0dan-kebijakan-luar-negeri](http://salmafisio13.web.unair.ac.id/artikel_detail/varibel-domestik0dan-kebijakan-luar-negeri)

<sup>12</sup> Wahab, Abdul Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta. Halaman 21

lembaga untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Sedangkan menurut Kartini Kartono (1996 : 64) bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat.<sup>13</sup>

Berdasarkan definisi kebijakan dan definisi politik yang telah disebutkan beberapa ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan adalah hal-hal yang dirumuskan oleh pemerintah yang menyangkut kebutuhan dan kebaikan masyarakat dalam suatu negara. Sedangkan politik adalah alat untuk mendapatkan kekuasaan agar mampu untuk merumuskan dan menegakkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan politik adalah hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah melalui kekuasaannya untuk memberikan yang terbaik bagi kebutuhan masyarakat dan negaranya. Kebijakan politik biasanya berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam hubungan luar negeri yang pada akhirnya diperuntukan bagi kemaslahatan rakyat dan negara.

Kelebihan *Level of Analysis* variabel domestik adalah fokusnya pada akibat konteks politik yang menawarkan kemungkinan pemahaman kebijakan luar negeri yang lebih kaya. Dengan memperjelas proses pengambilan keputusan oleh para pengambil keputusan, para analis dapat memperoleh pengertian terkait dengan bagaimana ketidakleluasaan/paksaan politik dibentuk ke dalam sebuah

---

<sup>13</sup> Kartono, Kartini. 1996. Pendidikan Politik. Mandar Maju. Bandung. Hal 64

kebijakan melalui penyesuaian nilai-nilai yang ada secara subjektif. Secara sederhana, para analis akan lebih mengerti bagaimana nilai-nilai masyarakat menjadi preferensi suatu negara. Kemudian kelemahan dari *Level of Analysis* (LoA) variabel domestik ini antara lain seringkali dianggap tidak begitu penting dalam analisis kebijakan luar negeri suatu negara dan tumpang tindih dengan sistem internasional. LoA variabel domestik menggunakan situasi politik domestik suatu negara sebagai instrumen/unit analisisnya. Situasi politik yang dimaksud bukan hanya merujuk pada para elit politik pembuat keputusan/kebijakan, namun lebih pada bidang yang luas, termasuk interaksi negara-masyarakat, dan juga aktor-aktor domestik yang berkiprah secara internasional seperti pelaku bisnis, kelompok penekan, kelompok kepentingan, media, dan lain sebagainya. LoA variabel domestik menjelaskan bagaimana para pembuat keputusan, terutama pemimpin selalu mendahulukan kepentingan masyarakat dalam mengaplikasikan kebijakan karena kepentingan pemimpin untuk terus berada di kekuasaannya.

Menurut Robert D. Putnam menjelaskan tentang hubungan Antara politik domestic dan internasional. Arti lain dari two level games ini sering pula diartikan dengan politik egosiasi internasional ataupun seringkali disebut permainan dua level. Pada kancah domestik seringkali mendesak pemerintah untuk melegalkan kebijakan yang menguntungkan dan para politikus untuk berkuasa dengan membentuk koalisi atau kelompok-kelompok politik.

Putnam mengkritik interpretasi kasus dimana sebab-sebab domestic dan pengaruh internasional yang diperkenalkan oleh Kenneth Waltz sebagai “*second image*”, maksud dari *second image* ini penyebab terjadinya kerusuhan disebabkan oleh negara ataupun sebab-sebab internasional dan pengaruh domestic yang diperkenalkan Peter Gourevitch sebagai “*second image reversed*” malah akan menyebabkan analisis yang hanya setengah-setengah dan tidak menawarkan analisis yang bisa mencakup semua faktor dan aktor yang terlibat secara simultan dan bersama.<sup>14</sup>

Apalagi faktor domestik dalam hubungan mesti melibatkan “politics” yang terdiri dari partai-partai, kelas sosial, kelompok kepentingan, legislator dan opini publik serta pemilu, tidak sekedar pegawai eksekutif dan institusi eksekutif. Jika hanya melibatkan negara dalam faktanya, ada banyak perbedaan mengenai apa itu kepentingan nasional dan konteks internasional yang mencakupnya.

---

<sup>14</sup> Arief Bactiar D, “*Antara Politik Domestic Dan Kebijakan Luar Negeri*”, <https://www.scribd.com/doc/136247477/Two-level-Game-Robert-Putnam> diakses 26 september 2018

## BAB III

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### A. Perjanjian Paris

Perjanjian internasional sebagai pengganti Protokol Kyoto 1997 harus dalam kerangka Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change tahun 1992, menerapkan prinsip applicable to all, bersifat multilateral dan rezim harus didasarkan pada aturan (rules based regime). Dalam UNFCCC 1992 pada prinsipnya menegaskan tujuan konvensi, prinsip-prinsip serta komitmen-komitmen harus dicapai. Tujuan UNFCCC 1992 yaitu menstabilkan gas-gas rumah kaca untuk mencapai tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim global. Agar tujuan UNFCCC 1992 tercapai, maka diperlukan tindak lanjut melalui perangkat hukum yang bersifat mengikat baik berupa Amandemen maupun Protokol. Beberapa perangkat yang dicapai untuk melaksanakan UNFCCC diantaranya Protokol Kyoto 1997, Amandemen Doha 2012 dan Paris Agreement 2015.<sup>15</sup>

Pada COP ke-21 UNFCCC yang diselenggarakan pada tanggal 30 November 2015 di Paris, Perancis. Paris Agreement 2015 telah berhasil diadopsi oleh lebih dari 156 negara. Hasil yang dicapai paling tidak telah berhasil

---

<sup>15</sup> Pramudianto A. Dari Kyoto Protocol 1997 Hingga Paris Agreement 2015: *Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global Dan Asean Menuju 2020* diakses 11 agustus 2018



menunjukkan arah terpenting bagi pembangunan di masa mendatang khususnya dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang rendah karbon. Pada perjanjian Paris 2015 menggunakan pendekatan yang lebih mencerminkan partisipasi yang luas serta menjamin negara-negara maju untuk tetap berkomitmen pada penurunan emisi hingga tahun 2030 agar tidak lebih dari 2 derajat celcius dan mempertahankan rata-rata 1,5 derajat celcius suhu bumi. Pihak yang berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yaitu prinsip kebersamaan tetapi berbeda tanggung jawab dan prinsip menghormati kemampuan dalam perbedaan kondisi nasional yang ada. Perjanjian ini dibentuk dengan tujuan global untuk melindungi generasi saat ini dan masa depan dari bahaya akibat perubahan iklim. Dari perspektif Perjanjian Paris, suatu negara tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan akibat perubahan iklim yang terjadi di negaranya sendiri dan di tingkat global tanpa bantuan dari negara atau aktor lain di dalam komunitas internasional. Masalah terkait perubahan iklim bukan hanya masalah yang bersifat domestik namun telah menjadi isu global sebagai dampak dari globalisasi.

Sebagai bentuk evaluasi dari Protokol Kyoto, perjanjian ini terbagi menjadi 6 bagian penting yang tertuang dalam isi perjanjian yakni mengenai Adaptasi dari Perjanjian, Kontribusi yang ditentukan secara *Intended Nationally Determined Contributions*, Keputusan untuk memberikan pengaruh terhadap perjanjian (termasuk upaya mitigasi, adaptasi, loss and damage, keuangan,

pengembangan dan transfer teknologi serta penyesuaian), Tindakan yang disempurnakan sebelum tahun 2020, pemangku dari Non-Negara Pihak, serta hal-hal terkait dengan administrasi dan anggaran biaya.<sup>16</sup> Paris Agreement 2015 terdiri dari 29 Pasal yang diadopsi pada tanggal 12 Desember tahun 2015 dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 22 April tahun 2016 di New York, Amerika Serikat. Perjanjian ini telah melalui berbagai diskusi, negosiasi, serta perdebatan sehingga memutuskan berbagai aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara di dunia sehingga mencegah dampak dari perubahan iklim. Dari aturan-aturan yang telah dibentuk tersebut kemudian memiliki pengaruhnya terhadap negara sehingga mau bergabung dan mengimplementasikannya dalam kebijakan nasional negara. Dari hasil pertemuan COP-21 di Paris tersebut tentu menawarkan keuntungan bagi negara ketika memutuskan untuk bergabung.

Dalam pasal 2.1 (a) negara-negara sepakat untuk menurunkan suhu global hingga 2,0 C dan diupayakan untuk menekan hingga 1,5 C. Upaya penurunan ini dilakukan agar mencegah gangguan antropogenik dengan sistem iklim. Selain itu, ambisi untuk menurunkan suhu ini juga agar dapat menyelamatkan negara-negara Small Island Developing States (SIDS) dan Least Developed Countries (LDCs), negara-negara inilah yang sangat menerima dampak dari perubahan iklim ini.<sup>17</sup>

Sementara Pasal 20 menyatakan bahwa Agreement ini akan terbuka untuk

---

<sup>16</sup>Christoff, P. (2016). The Promissory Note: COP 21 and the Paris Climate Agreement. *Environmental Politics* Vol. 25, No 5, 765-787, Hal 767 diakses 11 agustus 2018

<sup>17</sup>*ibid*

ditandatangani dan ratifikasi oleh negara dan organisasi ekonomi regional terintegrasi yang menjadi pihak UNFCCC. Sedangkan untuk pasal 21 menyatakan Agreement ini akan berlaku pada hari ke 33 sesudah tanggal, paling sedikit 55 pihak UNFCCC melaporkan jumlah paling sedikit 55 persen dari perhitungan jumlah gas rumah kaca global yang telah didepositkan instruments ratification, acceptance, approval, accession. Mengingat tujuan yang dibatasi berdasarkan ayat 1 pasal ini “*total global greenhouse gas emissions*” yang berarti jumlah paling up-to-date yang dikomunikasikan selama ini atau sebelum tanggal adopsi Agreement oleh para pihak UNFCCC.

#### **B. China dari Protokol Kyoto hingga Paris Agreement**

Perhatian masyarakat internasional mulai nyata saat perubahan iklim dunia mulai dirasakan sangat signifikan. Masyarakat internasional menyadari bahwa degradasi lingkungan tersebut tidak hanya terjadi pada satu negara tetapi juga melewati batas-batas negara. Upaya-upaya untuk menangani dampak negatif tersebut dilakukan yaitudengan dibentuknya konferensi yang bertujuan untuk membahas masalah lingkungan dan mengatasinya untuk mencegah dampak yang lebih parah. Pada pertemuan Rio di Brazil tersebut, Persrikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk badan khusus mengenai perubahan iklim, yaitu UNFCCC. Protokol Kyoto adalah sebuah persetujuan sah di mana negara-negara maju akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif. Protokol Kyoto terdiri dari 28 pasal dan dua lampiran, serta menetapkan penurunan emisi GAS akibat

kegiatan manusia. China meratifikasi Protokol Kyoto pada tanggal 30 Agustus 2002. Dilihat dari isi Protokol Kyoto, China dikategorikan sebagai negara berkembang yang tidak memiliki kewajiban khusus untuk memotong emisi. China telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi perubahan iklim, salah satunya adalah pemerintah China menyiapkan sebuah komite untuk meneliti mekanisme pembangunan bersih atau *Clean Development Mechanism (CDM)*, yang mana mekanisme tersebut adalah bagian dari Protokol Kyoto.

Dampak negatif industri di China selain berupa dari polusi yang dihasilkannya juga berasal dari energi yang digunakannya. Negara ini telah mendorong peningkatan penggunaan bahan bakar fosil dan batu bara sehingga meningkatkan kontribusi negara tersebut dalam menyumbangkan emisi CO<sub>2</sub> yang meningkatkan konsentrasi gas. Saat ini, China adalah negara penyumbang emisi CO<sub>2</sub> terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi China menjadi yang tertinggi dengan tingkat kebutuhan batu bara yang meningkat dari 26% hingga 30%, sedangkan kebutuhan batu bara dunia meningkat dua pertiga diantaranya adalah konsumsi China, dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Hal tersebut kemudian menjadikan China memiliki signifikansi yang besar dan posisi yang penting dalam penyelesaian permasalahan lingkungan hidup.

Protokol Kyoto dinilai sangat strategis bagi negara seperti China untuk melakukan perbaikan lingkungan hidup. Protokol Kyoto merupakan sebuah kesepakatan internasional yang mengamantakan negara-negara industri untuk

menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GAS) rata-rata sebesar 5,2% dari tingkat emisi tahun 1990. Protokol Kyoto diratifikasi pada tahun 1997 dan disetujui sebagai mekanisme untuk mereduksi emisi gas. China untuk menunjukkan sikap sebagai masyarakat internasional yang baik sebagai bentuk moral responsibility-nya terhadap permasalahan lingkungan yang melanda akibat tingginya kadar emisi gas, terutama dengan adanya tekanan-tekanan dari dunia internasional. China sebagai anggota masyarakat internasional dihadapkan pada tekanan-tekanan dari dunia internasional untuk semakin meningkatkan kontribusinya dan mengambil komitmen yang lebih kuat terhadap usaha-usaha penurunan emisi gas. Contoh yang tampak adalah pada CoP-17 di Durban, Afrika Selatan. Pada konferensi ini, China menyatakan diri bersedia untuk menerima sebuah komitmen yang mengikat pada reduksi emisi gas tersebut. Infrastruktur energi di China yang banyak di dominasi menggunakan batu bara, yang memiliki dampak serius atas pencemaran udara perkotaan, kesehatan masyarakat, lingkungan, dan pemanasan global. Pencemaran udara terjadi akibat dilepaskannya zat pencemar dari berbagai sumber ke udara. Sumber-sumber pencemar udara dapat bersifat alami maupun akibat aktivitas manusia.

Setelah pertemuan COP-21, China menandatangani perjanjian Paris ini diharapkan dapat memunculkan harapan yang besar seperti keinginan untuk membuat rencana pada periode 2030. Pada 2013 emisi gas per-kapita China (7,1

ton) masih terbilang rendah dibandingkan Amerika Serikat (16.4 ton).<sup>18</sup> Pada COP-21 China masih mendapat tekanan dari pihak internasional, faktor domestikpun mempengaruhi China untuk tetap mengikuti pertemuan yang diadakan setahun sekali ini. Faktor domestik pula yang membentuk China untuk membuat tindakan pada perubahan iklim negaranya. China mengalami masalah polusi parah, polusi udara telah mencapai tingkat krisis terutama karena pertumbuhan drastis dalam hal transportasi dan pabrik.

China memperhatikan tentang keamanan energi jangka panjang. Dengan populasi yang tidak diharapkan memuncak hingga pada sekitar tahun 2025 di sekitar 1,41 milyar, sehingga China memiliki inisiatif yang kuat untuk mempromosikan dalam mengubah sumber asli energi dan efisiensi penggunaan energi. Pemerintah juga memiliki inovasi dengan penghijauan ekonomi dan pembangunan dan mengeksport teknologi hijau (*green technologies*) dan mematikan industri yang tidak efisien. Berbagai faktor ini memberikan kontribusi pada pemerintah dalam mengambil keputusan untuk membuat undang-undang lingkungan yang semakin ambisius dan terprogram.

Pada Maret tahun 2014, Li Keqiang menyatakan perang melawan polusi. Sebuah program untuk mengurangi emisi dari emisi karbon dioksida sebesar 10.000 yang termasuk 12<sup>th</sup> Five Year Plan. 13<sup>th</sup> Five Year Plan dikeluarkan pada

---

<sup>18</sup> Marianda A. *Commentary The Paris Climate Agreement and the Three Largest Emitters: China, the United States, and the European Union* Technical University of Munich diakses 15 agustus 2018

awal 2016 meliputi langkah-langkah yang dimaksudkan untuk membantu China melaksanakan perubahan iklim 2030, energi efisien, dan target peralihan bahan bakar.

China berjanji sebelum konferensi perubahan iklim Paris tahun 2015, negaranya berjanji untuk mengurangi emisi gas sebelum dan setelah 2020. Empat janji China untuk tahun 2030 yaitu:

1. Mengatasi memuncaknya emisi karbon 2030 dan mengupayakan yang terbaik untuk mengatasi memuncaknya emisi.
2. Menurunkan emisi karbon per unit *gross domestic product* (GDP) 60-65 persen dari tingkat 2005
3. Meningkatkan energi bebas fosil (terbarukan dan nuklir) sumber energi campuran sekitar 20 persen
4. Meningkatkan volume saham hutan sekitar 4,5 milyar meter kubik lebih meningkat dari tahun 2005

China mengimplementasikan berbagai langkah-langkah untuk memenuhi tujuan ini, termasuk program *Consumption Based Accounting and Policy* (CAP) dan perdagangan karbon nasional, dan pengendalian konsumsi batu bara sebagai bagian dari rencana 13<sup>th</sup> Year Plan untuk 2016 sampai 2020.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pengaruh Paris Agreement Terhadap Penurunan Gas Emisi di China

Tahun 2016, intensitas karbon berkurang 6.6% dari tingkat tahun 2015 dan proporsi sumber bebas-fosil energi meningkat sebanyak 13,3%.<sup>19</sup> Perlindungan Hutan dan Reboisasi melakukan adaptasi perubahan dan pencegahan bencana dan penanggulangan yang diperkuat dengan sistem dan mekanisme untuk mengatasi perubahan iklim yang meningkat. Pembangunan pasar karbon sedang berlangsung secara tertib dan akan secara resmi diluncurkan di 2017. Sejak 2016, Cina mendapat dukungan kuat dari proses pemerintahan iklim global dan dipuji oleh komunitas internasional untuk kontribusi signifikan dan cepat meratifikasi perjanjian Paris dalam promosi kerjasama internasional dalam mengatasi perubahan iklim.

Laporan tahunan China dikeluarkan untuk membuat semua pihak untuk sepenuhnya memahami tindakan Cina, kebijakan dan prestasi dalam menanggapi perubahan iklim dari 2016 dan seterusnya. 19 Nasional Kongres Komunis Partai dari Cina (BPK) mengangkat tinggi persyaratan untuk mengatasi perubahan iklim global dan mempromosikan pengembangan karbon rendah dari perspektif Cina dan dunia. Dan berharap pengembangan ekonomi hijau, rendah karbon, membangun sebuah

---

<sup>19</sup> China Meteorological Administration, “China published 2017 China's Policies and Actions for Addressing Climate Change”  
[http://www.cma.gov.cn/en2014/news/News/201711/t20171122\\_456649.html](http://www.cma.gov.cn/en2014/news/News/201711/t20171122_456649.html) diakses 26 september 2018

sistem energi bersih, aman, efisien dan rendah karbon, advokat gaya hidup sederhana, moderat, *green and low-carbon lifestyle, accelerate the formation of green low-carbon new growth drivers*, mempromosikan: peningkatan kualitas pembangunan, aktif memenuhi komitmen mitigasi, dan mencapai kontribusi Nasional ditentukan seperti yang dijadwalkan.

Mengingatkan kembali Perjanjian Paris yang bertujuan utama untuk menahan laju peningkatan temperatur global hingga di bawah 2 derajat celcius dari angka sebelum masa revolusi industri, dan mencapai upaya dalam membatasi perubahan temperatur hingga setidaknya 1.5 derajat celcius karena memahami bahwa pembatasan ini akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak dari perubahan iklim. Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim, meningkatkan ketahanan iklim, dan melaksanakan pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca tanpa mengancam produksi pangan. Membuat aliran finansial yang konsisten demi tercapainya pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim.

Ditahun 2017 Presiden Amerika Serikat mengumumkan keputusannya untuk menarik dari perjanjian Paris, dikarenakan menurut Trump menggambarkan kesepakatan Paris sebagai perjanjian yang ditujukan untuk memincangkan, merugikan, dan memiskinkan Amerika Serikat. Setelah AS mengundurkan diri, Cina

saat ini berperan menjadi pemimpinan pada perubahan iklim, Cina memainkan peran *convening* dalam menyatukan negara di seluruh dunia untuk diskusi tentang cara menggunakan energi bersih. Pertemuan telah dijadwalkan jauh sebelum keputusan perjanjian Paris, tapi waktu mengirim pesan yang jelas tentang yang akan memimpin perjuangan untuk mengatasi perubahan iklim di tahun-tahun mendatang. Selama empat hari pertemuan, Cina meluncurkan sejumlah inisiatif untuk memajukan energi bersih dan mengumumkan kemitraan dengan pemerintah lainnya di seluruh dunia untuk memerangi perubahan iklim. Sebagai Premier Li Keqiang mengatakan setelah Trump mengumumkan rencananya untuk menarik dari kesepakatan iklim, "Cina akan berdiri dengan tanggung jawab pada perubahan iklim".<sup>20</sup>

Cina meluncurkan rencana untuk memulai pasar raksasa untuk kredit perdagangan untuk *emit planet-warming greenhouse gases*. Dalam rencana ini China memberi klarifikasi kata Li Junfeng, penasihat senior pemerintah rencana pasar karbon. "Segala sesuatu bertahap, langkah demi langkah". Pengumuman ini direspon baik oleh beberapa negara dikarenakan beberapa negara berkembang berharap pasar karbon ini bisa menutupi perekonomian negaranya.<sup>21</sup> Janji China di tahun 2020 yaitu mengurangi intensitas karbon 2005 oleh 40-45 persen pada tahun 2020, China membuat program *China's Green Gen* gasifikasi pembangkit batubara di Tianjin,

---

<sup>20</sup> Times.com, paris agreement: china takes lead on climate change, <http://time.com/4810846/china-energy-climate-change-paris-agreement/> diakses 26 september 2018

<sup>21</sup> Nwytime.com, "China Unveils an Ambitious Plan to Curb Climate Change Emissions" <https://www.nytimes.com/2017/12/19/climate/china-carbon-market-climate-change-emissions.html> diakses 26 september 2018

yang dirancang untuk membakar batubara lebih efisien dan membantu mengembangkan teknik penangkapan dan penyimpanan karbon. Ini memiliki tujuan untuk mengurangi emisi karbon oleh unit dari PDB sebesar 60-65 persen 2030, dan untuk menghentikan peningkatan emisi.

China gencar menginvestasikan modalnya untuk mengembangkan energi terbarukan demi membantu memerangi tingkat pencemaran di dunia. Hal ini juga realiasi janji China untuk menghentikan pertumbuhan emisi gas rumah kaca tahunannya pada tahun 2030 di bawah Paris Climate Agreement. Tahun 2015, China menginvestasikan USD 103 miliar untuk energi terbarukan, dan pada tahun 2016, total telah menghasilkan energi dengan kapasitas 77 gigawatt. Pencapaian China itu jauh melampaui para pemimpin lainnya dalam energi terbarukan seperti Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat. Energi terbarukan China dihasilkan dari ladang panel surya terbesar di dunia, Longyangxia, memiliki 4 juta panel surya. Ladang panel surya ini mampu menghasilkan listrik 850 megawatt. Longyangxia kemungkinan bukan pembangkit tenaga surya terbesar di China untuk waktu yang lama, ada sebuah proyek yang direncanakan di wilayah Ningxia, China Barat Laut yang akan memiliki kapasitas 2000 megawatt saat selesai. Berikut penampakan kompleks ladang panel surya yang dimiliki China.

Hal ini membuat China berperan penting dalam ekspor panel surya kenegara lain seperti contohnya Australia, masyarakat di Australia telah berhasil memanfaatkan tenaga surya untuk mencukupi kebutuhan listrik harinya. Ada 3,5 juta

panel surya yang dipasang di atap-atap rumah pada tahun 2017. Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa rata-rata 10 ribu panel surya dipasang tiap harinya. Masyarakat berbondong-bondong memasang panel surya dirumah mereka setelah perusahaan China menjual panel solar yang harganya jauh lebih murah. Selain itu meningkatnya tarif dasar listrik juga menjadi penyebab masyarakat beralih ke tenaga surya.

China adalah produsen terbesar teknologi panel solar, sebagai kebijakan china terhadap energi terbarukan. Hal ini juga di bahas dalam perjanjian paris pasal 10 tentang visi jangka panjang pentingnya menyadari oengembangan teknologi untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan untuk mengurangi emisi gas.<sup>22</sup> Salah satu ayat dari pasal 10 perjanjian paris mengenai pentingnya inovasi untuk respon global yang lebih efektif :

“Accelerating, encouraging and enabling innovation is critical for an effective, long-term global response to climate change and promoting economic growth and sustainable development. Such effort shall be, as appropriate, supported, including by the Technology Mechanism and, through financial means, by the Financial Mechanism of the Convention, for collaborative approaches to research and development, and facilitating access to technology, in particular for early stages of the technology cycle, to developing country Parties”

---

<sup>22</sup> Paris Agreement.  
([https://www.google.com/url?q=https://unfccc.int/sites/default/files/english\\_Paris\\_agreement.pdf&sa+U&ved=2ahUkEwiU6](https://www.google.com/url?q=https://unfccc.int/sites/default/files/english_Paris_agreement.pdf&sa+U&ved=2ahUkEwiU6)) diakses 26 september 2018

Walaupun di beberapa provinsi China masih menggunakan bahan batubara, tetapi diharapkan dengan adanya tekanan dari masyarakat internasional maupun masyarakat domestik yang menginginkan udara bersih.

## **B. Kebijakan Penurunan Gas Emisi China**

Kebijakan yang dikeluarkan China terhadap penurunan gas emisi tidak terlepas dari tekanan dari pihak internasional maupun domestik. Dari protokol Kyoto hingga perjanjian Paris China telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam penurunan gas emisi ini. Walaupun pada protokol Kyoto China tidak mematuhi aturan yang ditetapkan, tetapi pada perjanjian Paris ini China mencoba meyakinkan untuk mengikuti aturan yang ditetapkan. Tuntutan masyarakat China terhadap pencemaran di negaranya membuat pemerintah China akhirnya menerapkan beberapa kebijakan.

### **1. Kebijakan China di Protokol Kyoto**

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan China dalam upaya menurunkan emisi gas dan memperbaiki lingkungan yakni, mengencarkan propoganda China's Peaceful Development, beralih ke minyak konservasi, menggunakan limbah panas, merenovasi pembangkit listrik tenaga batubara. Selain itu pemerintah China juga melakukan konservasi energi dan melakukan tingkat efisiensi energi dan mengagendakan peningkatan perkotaan yang hijau hingga 35% serta mengurangi jumlah polutan perkotaan dan pedesaan hingga 10%. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan GDP negara tersebut sebesar 8%. China telah menerapkan

*Clean Development Mechanism (CDM)* berdasarkan Protokol Kyoto sejak 2002 sebelum China menjadi penghasil emisi gas terbesar. CDM merupakan kredit pengurangan emisi gas karbon di negara berkembang, dan dapat digunakan negara maju untuk memenuhi target pengurangan emisi negara mereka. China juga telah melakukan beberapa tindakan untuk mengatasi masalah lingkungan ini, seperti melalui Kemitraan Asia-Pasifik untuk Pembangunan Bersih dan Iklim, Kemitraan Teknologi Iklim, Strategi untuk Air Bersih dan Kerjasama Energi, Minyak AS-China dan Forum Gas Industri, Kemitraan Internasional untuk Ekonomi Hidrogen, *Internasional Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)*.

Peningkatan efisiensi dan penambahan kapasitas pembangkit tenaga batu bara pada tahun 2008 sudah mencapai 69% sehingga membuat rata-rata tingkat efisiensi pembangkit baru batu bara menjadi lebih besar. Teknologi energi bersih yang dikembangkan oleh negara-negara maju dalam rangka mengurangi dampak negatif dari pemakaian batu bara yang terus meningkat harus ditanggapi serius oleh pemerintah China dan pengusaha batu bara di Beijing.

Pada tahun 2009 pemerintah China menerapkan CSS (*Cascading Style Sheets*) dimana karbondioksida yang dilepas dari batu bara yang terbakar ditangkap dan dibuang dibawah tanah atau di laut. Program ini juga dilengkapi dengan tungku cerobong asap sehingga karbondioksida tidak akan dilepaskan di udara. Pemerintah China juga melakukan pembatasan kepemilikan jumlah kendaraan untuk

mengurangi jumlah emisi gas buang yang sudah sangat parah. Jumlah kendaraan dibatasi 240.000 unit dimana setiap bulannya kendaraan hanya boleh dijual 19.000-20.000 unit. Kota Beijing juga telah meningkatkan pelayanan transportasi umum guna mendukung kebijakan pembatasan kendaraan.<sup>23</sup>

China memiliki Clean Development Mechanism (CDM) merupakan mekanisme penurunan emisi gas yang berbasis pasar yang memungkinkan negara maju atau negara industri melakukan investasi di negara sedang berkembang di berbagai sektor dalam mencapai target penurunan emisi gas negara mereka. Mekanisme Pembangunan Bersih atau CDM secara umum bertujuan untuk membantu negara dalam upaya memenuhi sebagian kewajibannya menurunkan emisi gas rumah kaca dan membantu program pembangunan berkelanjutan di negara berkembang serta berkontribusi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca secara signifikan yang merupakan pencapaian Konvensi Perubahan Iklim 1992.

Munculnya isu CDM dalam COP3 berawal dari proposal negara Brazil yang mengusulkan agar dibentuk dana yang dapat digunakan untuk melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim oleh negara-negara yang sedang berkembang yang dikenal dengan Clean Development Fund ( CDF). Negara-negara industri tertarik untuk mengadopsi Mekanisme ini karena biaya yang dikeluarkan untuk proyek

---

<sup>23</sup> Riski Wandesta, (2016) "Kebijakan pemerintah republik rakyat china terkait protokol Kyoto" Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diakses 25 september 2018



Mekanisme Pembangunan Bersih diperkirakan lebih murah dibanding biaya untuk menurunkan emisi gas yang dihasilkan oleh negara-negara industri.

Pada tahun 2005, China mengimplementasikan kebijakan Clean Development Mechanism (CDM) atau Mekanisme Pembangunan Bersih sebagai bentuk komitmen mengurangi emisi gas yang dihasilkan negaranya. Pemerintah China melakukan pengembangan teknologi bersih guna mengurangi emisi dan mengatasi masalah lingkungan yang sedang dihadapi.<sup>24</sup> Negara-negara yang mengimplementasikan CDM akan memberikan beberapa keuntungan. Negara-negara ini akan mendapatkan investasi baru untuk melakukan proyek guna menurunkan emisi gas rumah kaca serta menumbuhkan pembangunan berkelanjutan di negara mereka. Melalui mekanisme ini, China dapat mengundang negara-negara maju atau negara-negara industri lainnya untuk berinvestasi dan juga kerjasama internasional. China juga dapat menerima transfer teknologi yang dapat membantu China dalam menghadapi dampak yang timbul akibat pemanasan global dan perubahan iklim. Adapun pemerintah China berupa menerapkan kebijakan Upgraded Brown Coal (UBC), pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai penambahan kapasitas batubara dengan menggunakan proses UBC, yaitu penurunan kadar air dalam batubara yang dilakukan dengan mekanik.

---

<sup>24</sup> Swastika Bunga, (2014), "*Upaya Pemerintah China Dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui CDM (Clean Development Mechanism) Sebagai Bentuk Implementasi Protokol Kyoto*" Universitas Jember diakses 30 september 2018

Pada masa Protokol Kyoto kebijakan China terhadap penurunan gas emisi masih sangat acuh dimana China menggunakan prinsip Common But Differentiated Responsibilities (CBDR). Prinsip tersebut memiliki arti bahwa negara berkembang menurunkan emisi gas secara sukarela, bukan sebagai kewajiban yang mengikat. Kebijakan 12th Five Years Plan diprediksi akan membuat China akan menolak segala keputusan yang dibuat dalam COP setelah masa kebijakan ini selesai atau setelah tahun 2020. Hal ini dikarenakan China merupakan negara yang terbuka terhadap segala sesuatu yang baru, dan akan meminta kredit untuk menyetujui suatu kesepakatan internasional dan memimpin arah negosiasi yang akan datang dengan menyebutkan apa yang telah China lakukan sebagai negara penghasil emisi gas terbesar didunia. Namun dalam COP ke 17, melalui negosiator pemerintah China Xie Zhenhua menerima kesepakatan dengan beberapa syarat dimana prinsip persamaan harus dijunjung tinggi yang berarti negara berkembang memiliki hak untuk memperoleh kompensasi atas polusi dari negara maju.

Kebijakan perubahan iklim di China didorong oleh prioritas domestik dan keamanan energi yang mencegah degradasi lingkungan lokal, rekonstruksi ekonomi dan citra di dunia internasional yang sebagian besar juga mengurangi emisi karbon. Dalam memahami kebijakan perubahan iklim China, poin utama tidak hanya memahami kepentingan dari aktor utama, tetapi juga seluruh aktor dalam pemerintahan yang terkait dengan kebijakan perubahan iklim. Prioritas utama

pemerintahan China adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang didasari untuk mengatasi kemiskinan, stabilitas sosial dan legitimasi pemerintah.

## **2. National Development and Reform Commission (NDRC)**

China mempunyai program pengembangan energi. Program pengembangan energi dirancang untuk meningkatkan pengembangan sumber daya energi terbarukan China. Program ini terdiri dari empat bagian: restrukturisasi industri energi dan lembaga, membuat strategi pengembangan energi dan mengidentifikasi tujuan, mengembangkan teknologi energi dan infrastruktur, meringkas dan mengukur prestasi.

Restrukturisasi energi program pertama yang memasukan unsur energi terbarukan. National Development and Reform Commission (NDRC) telah menerapkan beberapa inisiatif energi terbarukan seperti program kecerahan, yang merupakan upaya internasional untuk membawa listrik ke pedesaan. Dan program angin yang mendukung pengembangan turbin angin. Selain itu ada juga proyek yang lebih besar seperti pembangunan pipa gas alam dari Shanxi ke Beijing.

Strategi pengembangan energi dan mengidentifikasi tujuan dalam program ini meningkatkan efisiensi energi, melindungi lingkungan dan mempercepat pengembangan wilayah barat China. Program ini menyoroti energi terbarukan dalam pembangunan industri listrik. Pengembangan energi ini harus berjangka panjang, program ini menekankan pada sistem solar dan baterai, bioelektrik, energi panas

bumi, dan bahan bakar terkhususkan daerah pedesaan. Pengembangan energi dimaksudkan disini sebagai program pengembangan energi berfokus pada pengembangan teknologi energi dan infrastruktur lainnya. China berencana membangun turbin angin di daerah dengan kondisi yang tepat, mengundang tender internasional. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan persentase lokalisasi turbin angin dari 40%-70%. Program panel tenaga surya juga diinstal untuk memberikan 100W listrik per kapita ke delapan juta orang penduduk, sebagai bagian dari peretasan kemiskinan dari pemerintah.

China membangun kompleks pembangkit listrik tenaga surya di Datong, Shanxi. Fasilitas pembangkit listrik tenaga surya ini didukung oleh *United Nation Development Programme* (UNDP). Reformasi ekonomi yang henggang dari industri berat seperti pabrik baja masih berjalan lambat. Lebih dari 60 persen energi masih menggunakan batu bara, walaupun lajunya mulai melambat.<sup>25</sup> Adapun enam menara di Delingha yang berkapasitas 810 megawatt per tahun. Dilahan seluas 25 kilometer persegi, belasan ribu panel surya memantulkan cahaya matahari ke enam menara yang memanfaatkan panas untuk memproduksi listrik. Instalasi semacam ini lebih mahal ketimbang taman surya, tapi bisa memproduksi jumlah energi yang lebih konstan.

Tapi berbeda dengan di Beijing pabrik-pabrik sudah ditutup dikarenakan tuntutan masyarakat yang lebih membutuhkan udara bersih, air bersih dan makanan

---

<sup>25</sup> Dw.com, "China berambisi membangun taman sel surya terbesar" <https://www.dw.com/id/cina-berambisi-membangun-taman-sel-surya-terbesar/a-42290293> diakses pada tanggal 17 Agustus 2018

yang lebih aman. Walaupun pabrik-pabrik telah ditutup dan sudut jalanan Beijing dipenuhi dengan puluhan sepeda sewaan tetapi jalanan Beijing tetap dipenuhi dengan asap dan kabut terutama jika angin berhembus kearah yang salah. Seluruh kota bisa tertutup oleh asap dan kabut dalam waktu 20 menit dikarenakan asap dan kabut ini berasal dari provinsi tetangga dimana penggunaan batu bara tetap insentif dan pemerintah lokal yang acuh.

Untuk mewujudkan low-carbon green growth (LCGG), pada tahun 2012, Cina mempercepat pilot carbon ETSs di Beijing, Tianjin, Shanghai, Chongqing, Hubei, Guangdong, dan Shenzhen. Dalam hal ini, NDRC bertugas menyiapkan sebuah roadmap yang berisi tahapan-tahapan untuk menerapkan ETS di Cina. Tahapan pertama adalah *the preparation stage* (2014–2015), kemudian tahapan kedua adalah *trial and improvement stage* (2016–2020), di mana skema yang diinisiasi pada periode 2016-2017 akan secara formal diimplementasikan pada tahun 2017-2020. Selanjutnya pada tahapan ketiga, pasca-2020 akan berfokus pada peningkatan jenis *trading products*.

### **3. Intended Nationally Determined Contribution (INDC)**

Pada tahun 2015, China secara resmi mengajukan kontribusinya *Intended Nationally Determined Contribution* (INDC) untuk perjanjian iklim global baru bulan desember di Paris. China berkomitmen untuk tindakan pada tahun 2030: menurunkan karbon dioksida secara intensitas (emisi karbon dioksida per unit dari PDB) 60-65 persen dari tingkat tahun 2005; Meningkatkan saham dari konsumsi energi non -

bahan bakar fosil sekitar 20 persen; meningkatkan volume saham hutan sekitar 4,5 milyar meter kubik dari level.<sup>26</sup>

INDC membantu memperlambat naiknya emisi gas rumah kaca global. Menurut analisa Universitas Tsinghua, emisi karbon dioksida memuncak di sekitar 2030 akan tetapi emisi China mengurangi setidaknya 1.7 Gt atau 14 persen dari skenario yang paling optimis.<sup>27</sup>

Pada pertemuan Paris, INDC memerlukan ambisi lebih besar daripada skenario *business-as-usual* (BAU) yang paling optimis sekalipun. China harus mengejar berbagai kebijakan decarbonize dan mengurangi puncak emisi. Terutama, China bertujuan untuk membatasi konsumsi batubara di tahun 2020 dan berusaha untuk membatasi pertumbuhan konsumsi minyak. China bermaksud untuk mengembangkan bisnisnya dari gas alam, nuklir, hydro dan energi terbarukan lainnya. Dan juga energi efisiensi ini harus menguntungkan si semua sektor ekonomi dan lainnya. Pada kenyataannya, puluhan kebijakan harus berhasil diadaptasi dan diterapkan bagi China untuk meningkatkan konsumsi utama energi dari non - bahan bakar fosil sekitar 20 persen.

Cina ingin memangkas emisi karbon dioksida per unit produk domestik bruto (PDB) sampai 60 persen menjadi 65 persen dari level tahun 2005 pada 2030,

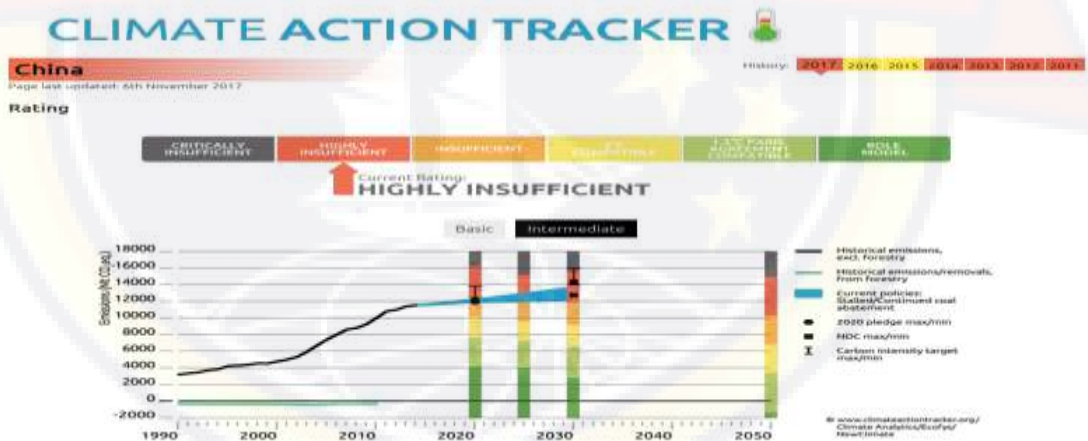
---

<sup>26</sup> Center For Climate And Energy Solution, "China's Contribution To The Paris Climate Agreement center for climate and energy solution" <https://www.c2es.org/site/assets/uploads/2015/07/chinas-contribution-paris-climate-agreement.pdf> diakses 26 september 2018

<sup>27</sup> ibid

menurut dokumen Kontribusi Nasional Penurunan Emisi Yang Diniatkan (*Intended Nationally Determined Contributions/INDC*) Cina. Rencana aksi ini juga disampaikan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada Februari tahun 2015, Departemen Perindustrian dan teknologi informasi dan Departemen Keuangan merilis rencana aksi 2015-2020 efisien penggunaan batubara, yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan batubara 160 juta ton dalam lima tahun ke depan. Untuk mengatasi polusi udara, Cina juga mematikan pembangkit listrik berbahan bakar batubara, misalnya di Beijing, dimana pembangkit listrik berbahan bakar batubara terakhir ditutup pada tahun 2017 dan diganti dengan pembangkit listrik gas. Tindakan ini mengakibatkan pengurangan emisi yang signifikan dalam penilaian Climate Action Tracker (CAT).



(Gambar 4.1 Grafik Emisi Gas di China, diakses melalui <https://www.climateactiontracker.org/climateanalytic/ecofys/newclimate> pada tanggal 14 september 2018)

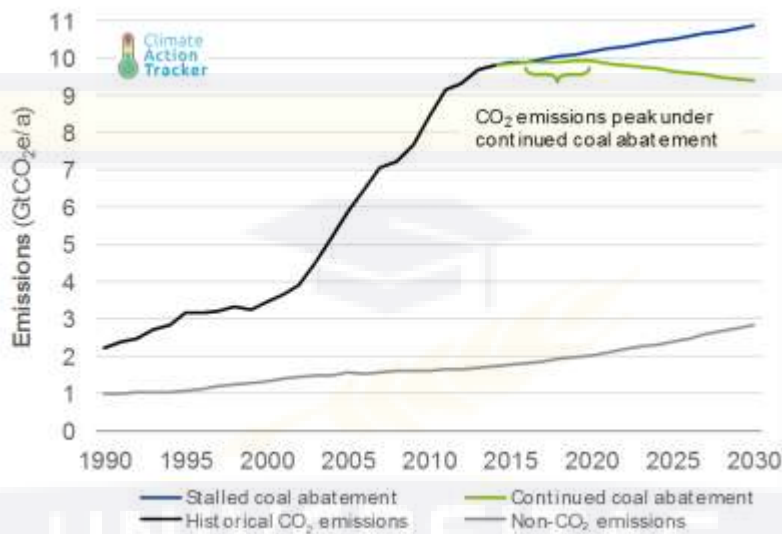
Beberapa dekade ini pembangunan rendah karbon, energi emisi karbon China menurun untuk pertama kalinya pada tahun 2015 sebesar 0,1% dan kemudian turun

0,7% pada tahun 2016. Konsumsi batubara, sebagai sumber utama karbon China, merosot terus-menerus dari tahun 2014-2016. Sementara itu, China menjadi generator atas di dunia sistem fotovoltaik surya pada tahun 2015 dan telah memimpin jalan pada energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air, angin dan tenaga surya. Konsep pembangunan berkelanjutan memainkan peran penting dalam tujuan energi terbarukan. Tujuan China dalam membuat energi terbarukan yaitu membatasi penggunaan sumber alam seperti gas alam, minyak bumi. Mempromosikan energi baru dan energi terbarukan. Memajukan teknologi batubara bersih. Mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

#### **4. 13th Five Year Plan**

Jika dalam periode 13<sup>th</sup> five year plan (2016-2020), Cina menetapkan sasaran berikut ini untuk menggunakan bahan bakar bebas-fosil yang terealisasikan pada tahun 2020. skenario dari penetrasi tinggi energi terbarukan, mencapai pangsa lebih dari 50% dari pembangkit listrik di tahun 2030. Sementara jika analisis skenario dan tidak terkait dengan kebijakan apa pun, laporan masih menunjukkan bahwa energi terbarukan dipandang sebagai pilar penting pasokan energi di China, yang secara signifikan dapat berkontribusi pada sistem energi berkelanjutan jangka panjang.





(Gambar 4.2 Grafik China menghentikan penggunaan batu bara, diakses <https://www.climateactiontracker.org/climateanalytic/ecofys/newclimate> pada tanggal 14 september 2018)

Pada tahun 2014, keadaan lingkungan di China menerapkan pemantauan kualitas udara standar baru, hanya 10% yang telah mencapai standar kualitas tahunan rata-rata. Pemantauan kualitas air sungai dan danau menunjukkan bahwa 6,5% dan 9,2% bagian yang ditandai sebagai kategori buruk. Selain itu, 30,3% wilayah memiliki kualitas ekologi relatif miskin, bahkan selama konferensi perubahan iklim Paris, Beijing menderita kabut parah.

China berupaya mengatasi perubahan iklim dan memperkuat dalam pengembangan karbon rendah, 13<sup>th</sup> Five Year Plan periode (2016-2020). Sebagian besar rencana kerja lima tahun ini masih berfokus kepada pembangunan nasional, ekonomi, sosial. Rencana kerja 13<sup>th</sup> Five Year Plan terhadap pengendalian gas emisi

*greenhouse* rencana ini telah dirumuskan dan dilaksanakan. Pemerintah daerah sudah merumuskan dan mengeluarkan target pengendalian gas rumah kaca. Langkah-langkah yang diambil untuk menerapkan kebijakan sektor dan perusahaan mengambil tindakan-tindakan yang inovatif, dan masyarakat berpartisipasi secara aktif.

Selain mengenai pengendalian gas rumah kaca, 13th five year plan juga membahas mengenai polusi air di China, di beberapa wilayah di china mengakui kualitas airnya sangat buruk. Yang menjadi fokus solusi pencemaran air ini menargetkan rencana saluran air ke seluruh wilayah mengalami kualitas air yang buruk. Serta 13th Five Year Plan membahas terutama polusi air industri, dan meningkatnya penggunaan peralatan pemantauan emisi berkelanjutan, baik untuk udara maupun air, telah membuat jenis polusi ini lebih mudah untuk dipantau dan dikelola.

## **5. Perdagangan Karbon**

Lima kota di China dan dua Provinsi yang menjadi promotor skema perdagangan karbon. Mekanisme berbasis pasar saat ini sedang dikembangkan di berbagai negara di dunia, total ada 37 jenis mekanisme berbasis pasar yang berupa pajak karbon, cap and trade, dan krediting tengah dikembangkan. Menguatnya komitmen global dan ditandatanganinya Perjanjian Paris adalah alasannya. Dukungan pengembangan pasar karbon pun diperlukan sebagai alat untuk mengikutsertakan

peran swasta dalam implementasi mitigasi perubahan iklim. Pada tahun 2017 china menyiapkan skema pasar karbon yang akan beroperasi pada tahun tersebut. yang diprediksi dua kali lebih besar daripada pasar karbon milik Uni Eropa yang masih dianggap sebagai pasar karbon terbesar di dunia. Pasar karbon merupakan sistem membeli dan menjual kredit yang terkait dengan emisi gas rumah kaca (GRK). Saat ini, skema pasar milik Uni Eropa yang meliputi 80 persen dari pasar global, sudah bernilai sekitar dua miliar ton karbon per tahunnya. Namun, pasar karbon China, apabila sudah beroperasi sepenuhnya, diprediksi akan bernilai antara tiga dan lima miliar ton karbon per tahun.<sup>28</sup>

Dengan adanya skema pasar karbon tersebut, Cina sudah menempatkan elemen yang penting saat berkomitmen dalam Perjanjian Paris, tahun lalu. Perkembangan pasar karbon ini juga telah membentuk perjanjian bilateral antara Cina dan AS pada tahun 2014 silam. Penerapan pasar karbon tersebut merupakan salah satu upaya Cina dalam mencapai target emisi puncak pada tahun 2030 dan selanjutnya akan menurunkan keluaran GRK. Untuk mencapai target tersebut, Cina telah berinvestasi besar pada energi matahari dan angin. Pasar karbon juga dilihat oleh pemerintah Cina sebagai salah satu cara untuk mengatasi polusi udara yang semakin serius dan berdampak kepada kesehatan dalam beberapa tahun belakangan, Cina telah melakukan uji coba sistem pasar karbon di kota-kota dan propinsi, utamanya daerah industri di bagian timur. Sejak tahun 2013, Beijing, Shanghai,

---

<sup>28</sup> Greeners.co. "China Mulai Lirik Pasar Karbon Global" <https://www.greeners.co/berita/cina-mulai-lirik-pasar-karbon-global/> diakses 25 september 2018

Tianjin, Shenzhen dan Guangzhou, sudah melaksanakan pasar karbon, sama halnya dengan provinsi Guangdong dan Hubei. Para pejabat Cina mengatakan bahwa awalnya perusahaan di delapan sektor, pembangkit listrik, petrokimia, kimia, gedung, baja, logam besi, kertas dan penerbangan akan dimasukkan ke dalam pasar karbon nasional.

Pasar karbon memiliki sejarah yang kompleks. Sistem Uni Eropa yang sudah beroperasi pada tahun 2005, telah gagal untuk menciptakan harga yang bisa merefleksikan kerusakan lingkungan akibat karbon dioksida dan gas lainnya. Salah satu manajemen dalam memberikan pinjaman karbon, tidak adanya pengawasan, merupakan beberapa alasan menjadi penyebab kurangnya kinerja pasar karbon Uni Eropa. Adapun kekhawatiran bahwa sistem Cina akan mengalami masalah yang sama. Skema pasar karbon yang efisien sangat bergantung kepada data yang lengkap dan akurat. Hal ini merupakan kelemahan dari Cina yang memiliki kebijakan yang tergolong tertutup untuk industrinya. Banyak perusahaan dan pejabat lokal juga masih kekurangan sumber daya untuk melakukan pengawasan emisi dengan akurat. Secara umum, pemerintah pusat melihat pasar karbon sebagai bagian utama dalam mencegah perubahan iklim, pejabat di level regional bisa menyabotase sistem tersebut untuk mendapatkan imbalan dari industri lokal. Rencana Cina untuk menurunkan emisi GRK berada di bawah tekanan dari banyak arah.

Skema perdagangan karbon China masih menghadapi beberapa masalah dan membutuhkan perbaikan lebih lanjut. Menurut Li Gao, seorang pejabat Departemen

Perubahan Iklim pada Komisi Pembangunan dan Reformasi China, mengatakan dalam konferensi pers di Beijing bahwa pembangunan sistem perdagangan emisi nasional "rumit" dan melibatkan pengujian konstan serta penyesuaian berlanjut.<sup>29</sup> Walaupun begitu China sudah memperdagangkan secara akumulatif total 197 juta ton karbon dioksida dengan total nilai 4,5 miliar yuan (678,35 juta dolar AS) pada tujuh proyek percontohan pertukaran karbon hingga akhir September 2017.

---

<sup>29</sup> Antaranews.com, “China Hadapi Masalah Dalam Penerapan Skema Perdagangan Karbon” <https://www.antaranews.com/berita/662149/china-hadapi-masalah-dalam-penerapan-skema-perdagangan-karbon> diakses 25 september 2018

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Tiap tahunnya perubahan iklim menjadi kerisauan semua orang didunia ini, apalagi ketidakseimbangan penggunaan sumber daya alam. Beberapa negara maupun organisasi internasional pada akhirnya membentuk berbagai perjanjian internasional mengenai lingkungan. Salah satunya adalah protokol kyoto yang bertujuan untuk menstabilitas gas-gas untuk mencapai tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim global. Tetapi dalam perjalanannya protokol kyoto mendapatkan kritikan dari berbagai negara dan akhirnya pembaruan protokol kyoto menjadi perjanjian paris.

China sebagai salah satu penyumbang gas emisi terbesar didunia yang mengambil andil dalam perjanjian paris, walaupun pada protokol kyoto china berpartisipasi tetapi pada saat itu china masih menjadi negara berkembang dan protokol kyoto tidak mengikat untuk negara berkembang. Sehingga china tidak merasa berkewajiban untuk menurunkan gas emisinya.

Namun semakin lama gas emisi di china semakin parah dan membuat berbagai masyarakat internasional dan masyarakat domestik memberikan protesnya terhadap pemerintah china. Sebagai salah satu upaya pemerintah china membuat beberapa kebijakan untuk mengurangi gas emisi di negaranya, pada saat china meratifikasi protokol kyoto membuat beberapa kebijakan seperti penerapan Clean

Development Mechanism (CDM) merupakan mekanisme penurunan gas emisi yang berbasis pasar yang memungkinkan negara maju atau negara industri melakukan investasi di negara sedang berkembang.

China melakukan rencana kerja dalam kurun waktu 5 tahun sekali atau yang disebut dengan 13th Five Year Plan. 13th Five Year Plan yang berfokus pada pembangunan nasional, ekonomi dan sosial pada perihal lingkungan serta lebih berfokus kepada pengendalian gas-gas emisi yang dihasilkan beberapa pabrik di beberapa provinsi di china.

Sebagai tambahan kebijakan china dipengaruhi besar oleh perjanjian paris mengenai teknologi lahan panel surya yang ditempatkan di beberapa provinsi di china. Panel surya di china saat ini berada di tingkat pertama didunia dalam pembaruan energi, walaupun tetap ada batasan yang di tetapkan oleh UNFCCC. Pada pasal perjanjian paris terdapat pasal mengenai pengembangan teknologi dan pembaruan energi.

Serta skema perdagangan karbon yang masih diterapkan, walaupun terjadi beberapa permasalahan tetapi China tetap mengupayakan kebijakan ini dan diharpkannya skema perdagangan ini dapat diterapkan di berbagai negara yang mengalami peningkatan emisi gas setiap tahunnya.

## **B. Saran**

Perkembangan teknologi di China semakin pesat, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Diharapkan China lebih mengembangkan teknologi untuk dapat mengurangi ataupun mengontrol gas emisi. Seperti pengembangan panel surya yang lebih efektif dan dapat digunakan di masyarakat umum. Serta untuk mengurangi dampak pemakaian batubara yang terus meningkat harus mendapat perhatian lebih khusus oleh pemerintah China serta dapat dipantau oleh masyarakat. Kemudian program – program yang belum terealisasi secepatnya dapat berjalan.

Selanjutnya data tentang emisi yang keluar setiap tahun diharapkan dapat di data secara rinci sehingga data berguna untuk memantau kondisi di wilayah tersebut. Data inilah yang menjadi upaya selanjutnya dalam mengatasi permasalahan di lingkungan China. Dan juga perkembangan teknologi yang menjadi program penurunan gas emisi di China dapat berfokus kepada pembaruan energi yang lebih bisa digunakan oleh berbagai negara.



## DAFTAR PUSTAKA

Arief Bactiar D, “*Antara Politik Domestic Dan Kebijakan Luar Negeri*”,  
<https://www.scribd.com/doc/136247477/Two-level-Game-Robert-Putnam> diakses 26  
september 2018

Antaraneews.com, “*China Hadapi Masalah Dalam Penerapan Skema Perdagangan Karbon*”  
<https://www.antaraneews.com/berita/662149/china-hadapi-masalah-dalam-penerapan-skema-perdagangan-karbon> diakses 25 september 2018

China Meteorological Administration, “*China published 2017 China's Policies and Actions for Addressing Climate Change*”  
[http://www.cma.gov.cn/en2014/news/News/201711/t20171122\\_456649.html](http://www.cma.gov.cn/en2014/news/News/201711/t20171122_456649.html) diakses  
26 september 2018

Climate Action Tracker, <https://climateactiontracker.org/countries/China/>diakses  
pada 16 juli 2018

Christoff, P. (2016). The Promissory Note: COP 21 and the Paris Climate Agreement. Environmental Politics Vol. 25, No 5, 765-787, Hal 767

Dewi Utariah,(2006) “*The International Politics Of The Environment*”. Universitas Padjadjaran,

Dw.com, “*China berambisi membangun taman sel surya terbesar*”  
<https://www.dw.com/id/cina-berambisi-membangun-taman-sel-surya-terbesar/a-42290293> diakses pada tanggal 17 Agustus 2018

Fariyasha Erik 2009 “*Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Isu Perubahan Iklim Global Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono*” Universitas Indonesia

Greeners.co. “*China Mulai Lirik Pasar Karbon Global*”  
<https://www.greeners.co/berita/cina-mulai-lirik-pasar-karbon-global/> diakses 25  
september 2018

Komeini Ayatullah 2017 “*Diplomasi Tiongkok Terhadap Amerika Serikat dalam Paris Agreement tahun 2015-2016.*” Universitas Riau.

Latuconsina, 2017 “*Perubahan Kebijakan Lingkungan Kanada di Bawah Pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau Dalam Meratifikasi Perjanjian Paris Tahun 2016*”. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Marianda A. “*Commentary The Paris Climate Agreement and the Three Largest Emitters: China, the United States, and the European Union*” Technical University of Munich diakses 15 agustus 2018

Nwytime.com, “*China Unveils an Ambitious Plan to Curb Climate Change Emissions*” <https://www.nytimes.com/2017/12/19/climate/china-carbon-market-climate-change-emissions.html> diakses 26 september 2018

Paris Agreement.

([https://www.google.com/url?q=https://unfccc.int/sites/default/files/english\\_Paris\\_agreement.pdf&sa+U&ved=2ahUkEwiU6](https://www.google.com/url?q=https://unfccc.int/sites/default/files/english_Paris_agreement.pdf&sa+U&ved=2ahUkEwiU6)) diakses pada 11 juli 2018

Pramudianto A. Dari Kyoto Protocol 1997 Hingga Paris Agreement 2015: *Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global Dan Asean Menuju 2020* diakses 11 agustus 2018

Riski Wandesta, (2016) ”Kebijakan pemerintah republik rakyat china terkait protokol Kyoto” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diakses 25 september 2018

Salma, “*Variable Domestik Dan Kebijakan Luar Negeri*”, [http://salmafisio13.web.unair.ac.id/artikel\\_detail/varibel-domestik0dan-kebijakan-luar-negeri](http://salmafisio13.web.unair.ac.id/artikel_detail/varibel-domestik0dan-kebijakan-luar-negeri)

Tempo.co. “ktt perubahan iklim di Paris berakhir berikut hasil pembahasan” (<https://nasional.tempo.co/read/727284/ktt-perubahan-iklim-di-Paris-berakhir-berikut-hasil-pembahasan>) diakses pada 16 juli 2018

Times.com, paris agreement: china takes lead on climate change, <http://time.com/4810846/china-energy-climate-change-paris-agreement/> diakses 26 september 2018

WWF, *Upaya WWF Terhadap Tantangan Tentang Iklim Dan Energi*, [https://www.wwf.or.id/tentang\\_wwf/upaya\\_kami/iklim\\_dan\\_energi/tentang\\_iklim\\_dan\\_energi/tantangan/](https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/iklim_dan_energi/tentang_iklim_dan_energi/tantangan/) diakses pada 16 juli 2018

Yansan Mochamad,(2008) “*Perspektif-perspektif Politik Luar Negeri*,” [http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/perspektif\\_perspektif\\_politik\\_luar\\_negeri.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/perspektif_perspektif_politik_luar_negeri.pdf) diakses 11 juni 2018